

PROGRAM JKN DALAM PENCAPAIAN UHC (*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*) DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Nurhesti Sipahutar^{1*}, Ade Suri Lestari², Tiara Nanda Puspita Tanjung³, Sabrina Renanda⁴, Fitriani Pramita Gurning⁵

Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4,5}

*Corresponding Author : nurhestysipahutar@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ternyata masih banyak wilayah/daerah yang penduduknya belum ter-cover oleh JKN dan belum mencapai indikator UHC, yaitu kurang lebih 16 dari Provinsi termasuk di dalamnya wilayah Sumatera Utara. Untuk itu Kementerian Kesehatan RI memberikan dorongan agar seluruh Pemda untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah survei data. Adapun sumber data yang digunakan merupakan data sekunder dengan teknik analisis data berupa statistik deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian program JKN dalam angka UHC di kabupaten Simalungun, provinsi Sumatera Utara. Peserta yang memiliki BPJS di Kabupaten Simalungun baik yang PBI maupun Non PBI sebanyak 515.514 jiwa penduduk. Hal ini sesuai dengan data kepemilikan BPJS Kabupaten Simalungun tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis statistik persentase kepemilikan BPJS di Kabupaten Simalungun sebesar 51,36%. Kabupaten Simalungun juga memiliki Jamkesda, namun sayangnya penduduk yang tercover hanya 2,29 % dari total keseluruhan. Maka berdasarkan persentase diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Simalungun belum mencapai keberhasilan indikator *Universal Health Coverage*.

Kata kunci : BPJS, implementasi, UHC

ABSTRACT

In implementing Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning Optimization of the National Health Insurance Program (JKN), it turns out that there are still many regions/areas whose population has not been covered by JKN and has not yet reached the UHC indicator, namely approximately 16 of the Provinces including the North Sumatra region. For this reason, the Indonesian Ministry of Health is giving encouragement so that all regional governments can immediately pursue the coverage of participation in their regions and be integrated with the JKN Program. The method used in this research is quantitative with the type of research used is survey data. The data source used is secondary data with data analysis techniques in the form of descriptive statistics. The purpose of this study was to determine the achievement of the JKN program in UHC figures in Simalungun district, North Sumatra province. Results: Participants who have BPJS in Simalungun Regency, both PBI and Non-PBI, are 515,514 residents. This is in accordance with data on BPJS ownership in Simalungun Regency for 2021. Based on the results of statistical analysis, the percentage of BPJS ownership in Simalungun Regency is 51.36%. Simalungun Regency also has Jamkesda, but unfortunately only 2.29% of the total population is covered. So based on the percentage above, it can be concluded that Simalungun Regency has not yet achieved the success of the Universal Health Coverage indicator.

Keywords : BPJS, implementation, UHC

PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah salah satu komponen Sistem Jaminan Sosial (SJSN) yang dibentuk dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang aman dan sehat yang tersedia untuk diberikan kepada siapa saja yang telah membayar asuransi dan atau memiliki asuransi yang ditanggung oleh pemerintah. (Sekretaris Negara RI

2004). JKN adalah jaminan perlindungan kesehatan yang dimaksudkan agar peserta dapat memperoleh manfaat dari pendidikan dan jaring perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan setiap orang yang telah membayar iuran atau jurannya dibayar oleh pemerintah (Peraturan Presiden 2014). Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU, 2013), Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. (Ii 2013).

Menurut WHO angka cakupan Universal Health Coverage (UHC) adalah 98 %. Berdasarkan data bps kementerian RI, Indonesia telah mencapai 90 % angka UHC. Terdapat 22 provinsi dan 334 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang mendapatkan UHC award yang diserahkan oleh wakil Presiden pada 14 maret 2023 lalu, yang telah berhasil mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau *Universal Health Coverage (UHC)* di Indonesia. Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. (Presiden Republik Indonesia 2022). Namun disisi lain masih banyak wilayah/daerah yang penduduknya belum ter-cover oleh JKN dan belum mencapai indikator UHC, yaitu kurang lebih 16 dari Provinsi termasuk di dalamnya wilayah Sumatera Utara. Untuk itu Kementerian Kesehatan RI memeberikan dorongan agar seluruh Pemda untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. (Retnaningsih 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 persentase penduduk wilayah Sumatera Utara yang memiliki jaminan asuransi kesehatan berdasarkan jenisnya adalah 32.97 % PBI, 22.93 % Non PBI, 4.97 % Jamkesda, 0.66 % asuransi swasta, dan 4, 37 % asuransi perusahaan/kantor. Artinya, hanya 65 % penduduk wilayah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki jaminan asuransi kesehatan (BPS Provinsi Sumatera Utara 2021). BPJS Kesehatan telah melakukan pendataan awal di Kabupaten Simalungun pada periode April 2022 sebanyak 13.217 dan hasil verifikasi Disdukcapil ditemukan data Aktif (jiwa) sebanyak 12.347 dan data bermasalah (jiwa) sebanyak 870. Data bermasalah data tersebut ditemukan namun tidak aktif sebanyak 3, data penduduk meninggal sebanyak 39, data belum direkam sebanyak 199, data tidak ditemukan di master file Disdukcapil sebanyak 629 jiwa. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah banyak dilakukan oleh pemerintah selama ini, yakni melalui penyediaan fasilitas kesehatan hingga asuransi kesehatan yang dijamin untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Disadari bahwa keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa. Dengan penduduk yang sehat, pembangunan di harapkan dapat berjalan dengan lancar. Namun, tersedianya sarana kesehatan tidak akan memiliki arti tanpa adanya intervensi dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan data BPS Kabupaten Simalungun, masih banyak nagori/kelurahan yang kesulitan untuk mencapai sarana kesehatan dan sampai saat ini juga masih belum jelas informasi data jumlah kunjungan pasien menurut kartu Asuransi Kesehatan yang dimiliki masyarakat di wilayah tersebut.(Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun 2021) .

Maka daripada itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian program JKN dalam angka UHC di kabupaten Simalungun, provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan peneliti agar tersedianya informasi atau pun data yang valid bagi pihak yang membutuhkan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah survei data. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder,

dimana data diperoleh dari sumber data BPS provinsi Sumatera Utara yang telah dipublikasi. Teknik analisis data adalah statistik deskriptif untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data-data kepesertaan BPJS penduduk Simalungun yang sudah terkumpul sebelumnya tanpa merubah sumber datanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencapaian program JKN dalam angka UHC di kabupaten Simalungun, provinsi Sumatera Utara.

HASIL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Jenis Kelamin	N	Persentase
Laki Laki	504.242	50,24
Perempuan	499.485	49,76

Tabel 2. Persentase penduduk yang memiliki asuransi kesehatan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2021

Kabupaten	BPJS PBI	Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan / Kantor
Nias	56,35	9,00	1,67	0,00	0,00
Mandailing Natal	32,09	12,62	0,29	0,41	0,21
Tapanuli Selatan	25,33	12,94	0,24	0,30	2,85
Tapanuli Tengah	33,70	16,53	7,40	0,10	2,91
Tapanuli Utara	35,85	17,90	0,82	0,31	0,74
Toba Samosir	40,46	24,11	0,35	0,17	1,87
Labuhanbatu	27,41	20,43	16,79	0,71	1,30
Asahan	30,52	18,62	0,29	0,19	7,81
Simalungun	24,17	27,19	2,29	0,21	21,17
Dairi	34,26	18,24	0,52	0,09	0,04
Karo	30,72	26,29	1,28	0,36	0,94
Deli Serdang	21,65	30,51	1,01	0,39	5,67
Langkat	41,37	14,82	0,66	0,29	5,13
Nias Selatan	29,64	3,63	0,56	0,05	0,26
Humbang	42,55	20,62	0,20	0,61	0,30
Hasundutan					
Pakpak Barat	73,47	13,81	0,00	0,07	0,11
Samosir	53,71	17,89	12,02	0,06	0,88
Serdang Bedagai	29,54	21,72	0,28	0,04	2,07
Batubara	39,59	17,91	0,29	0,19	2,70
Padang Lawas Utara	26,04	15,42	0,99	0,00	5,53
Padang Lawas	30,58	19,46	0,00	0,03	1,71
Labuhanbatu Selatan	19,09	25,31	0,51	0,00	3,65
Labuhan Batu Utara	24,65	21,23	0,09	0,02	1,45
Nias Utara	61,44	4,58	0,20	0,00	0,00
Nias Barat	63,66	7,85	1,29	0,00	0,00
Sibolga	69,24	15,80	0,00	0,06	0,57
Tanjung Balai	57,03	11,61	0,03	0,08	1,16
Pematang Siantar	33,73	36,65	0,13	0,35	5,45
Tebing Tinggi	41,20	32,15	51,67	1,24	1,83
Medan	32,03	32,08	19,21	2,75	11,29
Binjai	36,23	23,56	0,00	0,79	3,26
Padang Sidempuan	24,53	27,16	0,00	0,44	2,34
Gunung Sitoli	61,70	17,06	0,09	0,00	0,19

Pada tabel 1 terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan, yaitu sebanyak 504.242 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 499.485 jiwa.

Berdasarkan tabel 2, program JKN dalam pencapaian Universal Health Coverage tertinggi di wilayah Sumatera Utara pada tahun 2021 adalah kabupaten Pakpak Barat yakni sebesar 87,28 %. Kemudian disusul oleh kota Sibolga 85,04%, dan kabupaten Nias Barat 71,51 %. Hal ini dilihat dari persentase kepesertaan BPJS berdasarkan kelompok yaitu PBI maupun Non PBI. Jika dilihat dari persentase wilayah peserta BPJS berdasarkan kelompok peserta PBI terbanyak di kabupaten Pakpak Barat sedangkan Non PBI terbanyak di kota Pematang Siantar. Selain itu beberapa kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara juga memiliki Jaminan Kesehatan Daerah masing-masing dengan peserta terbanyak yang memiliki Jamkesda adalah kota Tebing Tinggi yakni sebesar 51,67 %.

Tabel 3. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Simalungun tahun 2021

Jenis Asuransi	N	%
BPJS PBI	242.600	24.17
BPJS Non PBI	272.913	27.19
Asuransi Swasta	2.107	0.21
Jamkesda	22.985	2.29
Perusahaan	11.746	1.17
Non Asuransi	451.376	44.97

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa proporsi penduduk yang memiliki asuransi kesehatan yang dicover oleh JKN di kabupaten Simalungun sebesar 53,65%. Artinya jumlah penduduk yang memiliki asuransi Kesehatan yang bersumber dari pemerintah sebanyak 538.499 jiwa. Adapun peserta BPJS PBI sebesar 24,17 %, BPJS Non PBI 27,19%, dan Jamkesda 2,29 %.

PEMBAHASAN

Peserta yang memiliki BPJS di Kabupaten Simalungun baik yang PBI maupun Non PBI sebanyak 515.514 jiwa penduduk. Hal ini sesuai dengan data kepemilikan BPJS Kabupaten Simalungun tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis statistik persentase kepemilikan BPJS di Kabupaten Simalungun sebesar 51,36%. Artinya belum semua penduduk tercakup sebagai peserta program JKN serta daerah tersebut belum mencapai keberhasilan indikator Universal Health Coverage. Kabupaten Simalungun juga memiliki Jamkesda, namun sayangnya penduduk yang tercover hanya 2,29 % dari total keseluruhan. Selebihnya peserta yang tidak memiliki asuransi kesehatan yaitu sebesar 44,97 % atau sebanyak 451.376 jiwa penduduk yang sama sekali tidak memiliki asuransi kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahayu 2016) di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun bahwa belum maksimalnya implementasi program BPJS jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya yaitu hanya sekitar 45,88% dari seluruh jumlah penduduk.

Adapun beberapa faktor penyebab belum tercapainya target implementasi program BPJS di Kabupaten Simalungun berdasarkan penelitian sebelumnya adalah masih banyak terjadi perubahan informasi yang menyulitkan masyarakat, tata kelola organisasi yang belum stabil, kurangnya sosialisasi yang diberikan dan informasi yang disampaikan petugas tidak detail sehingga masih ada masyarakat yang mengetahui hanya dari tetangga atau dari televisi, jumlah SDM yang kurang memadai, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme JKN, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Dari hasil pra riset yang dilakukan oleh (Rahayu, 2016) juga ditemukan beberapa fenomena yang terjadi terkait implementasi program BPJS yakni : masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, masih kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai prosedur pendaftaran sebagai peserta BPJS, dan adanya keluhan peserta mengenai prosedur pembayaran iuran dengan sistem online. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian (Rizky, Rafieqah Nalar

and Mahardika 2023) di Kota Medan bahwa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di RSUD adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat, kesadaran bagi peserta mandiri untuk membayar iuran, dan peserta JKN yang belum paham sistem rujukan berjenjang dan prosedur pelayanan JKN.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hanindiya 2022) di Kota Pematang Siantar bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memiliki BPJS kesehatan adalah faktor pendidikan, pengetahuan, penghasilan, serta jumlah anak dalam suatu keluarga. Kemudian menurut penelitian (Untari and Putri 2015) bahwa adanya pengaruh sosial ekonomi terhadap status kepesertaan BPJS di Desa Plumbon Mojolaban Sukaharjo dimana rata-rata masyarakat yang memiliki BPJS kesehatan hanya masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah kebawah dan termasuk kedalam golongan peserta PBI jaminan kesehatan. Hal ini didukung oleh penelitian (Rahmiyati 2018) bahwa masyarakat dengan penghasilan tinggi lebih memilih berobat ke klinik atau dokter pribadi. Selain itu ditemukan juga persepsi yang salah di masyarakat dimana masyarakat akan menjadi peserta BPJS ketika salah satu dari anggota keluarganya sakit. Ada juga persepsi bahwa alur pelayanan BPJS membutuhkan waktu tunggu yang lama dan sulit untuk mendapatkan pelayanan medis (Sonia et al. 2022). Kemudian ada juga asumsi masyarakat bahwa BPJS itu hanya untuk golongan orang-orang yang tidak mampu atau tingkat sosial ekonomi menengah kebawah. Hal tersebut juga mencerminkan penelitian (Nandi, Schneider, and Garg 2018) yang melaporkan bahwa daerah yang lebih miskin di India memiliki pendaftaran asuransi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lebih kaya, namun sebaliknya ketersediaan rumah sakit yang lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menjadi peserta BPJS.

Selain itu, letak geografis juga dapat menjadi faktor penghambat program JKN dalam pencapaian UHC.. Adanya pola kerawanan geografis yang semakin jauh dengan jarak dari pusat (dan ibu kota negara) menuju pinggiran negara. Sehingga indikator kerentanan sosio-ekonomi menyatu secara geografis dan menciptakan ketidaksetaraan, yang mencerminkan sifat deprivasi multidimensi dan interseksional. Meskipun cakupan asuransi kesehatan adalah adil, tapi ketersediaan layanan tidak juga dapat menjadi permasalahan dalam proses pencapaian program JKN di Indonesia . Tanpa kebijakan yang tepat untuk perbaikan ketersediaan layanan di daerah yang lebih rentan, cakupan dengan skema asuransi tidak mungkin mencapai tujuan pemerataan Universal Health Coverage (UHC).

KESIMPULAN

Maka dari pembahasan diatas dapat disimpulkan dari data kepemilikan BPJS Kabupaten Simalungun tahun 2021 didapatkan hasil analisis statistik persentase kepemilikan BPJS di Kabupaten Simalungun sebesar 51,36% atau 515.514 jiwa penduduk baik PBI maupun Non PBI. Kabupaten Simalungun juga memiliki Jamkesda, namun sayangnya penduduk yang tercover hanya 2,29 % dari total keseluruhan. Selebihnya peserta yang tidak memiliki asuransi kesehatan yaitu sebesar 44,97 % atau sebanyak 451.376 jiwa penduduk yang sama sekali tidak memiliki asuransi kesehatan yang artinya belum semua penduduk tercakup sebagai peserta program JKN. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memiliki BPJS kesehatan adalah faktor pendidikan, pengetahuan, penghasilan, serta jumlah anak dalam suatu keluarga. Maka berdasarkan persentase diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Simalungun belum mencapai keberhasilan indikator Universal Health Coverage.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian dan penulisan artikel ini dapat terselesaikan karena ada bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Fitriani Pramita Gurning,

SKM.,M.Kes yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan telah berkontribusi untuk mereview dan merevisi jurnal ini. Selain itu penulis juga berterimakasih kepada pihak pemerintah BPS Simalungun dan juga BPS provinsi Sumatera Utara yang telah menyediakan data dengan transparansi sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data. Penulis juga tidak lupa berterimakasih kepada teman-teman yang tidak dapat disebut satu per satu karena telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun. 2021. *Simalungun Regency in Figures Kabupaten Simalungun Dalam Angka 2021*.
- BPS Provinsi Sumatera Utara. 2021. "Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021."
- Hanindiya, Beta. 2022. "Gambaran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Tidak Memiliki BPJS Mandiri Diwilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematang Siantar Tahun 2017." *Jurnal Kesehatan* 10(1): 95–100.
- Ii, Distribusi. 2013. "Law of the Republic of Indonesia No. 24 of 2013 Regarding Amendment on Law No. 23 of 2006 Regarding Citizen Administration."
- Nandi, Sulakshana, Helen Schneider, and Samir Garg. 2018. "Assessing Geographical Inequity in Availability of Hospital Services under the State-Funded Universal Health Insurance Scheme in Chhattisgarh State, India, Using a Composite Vulnerability Index." *Global Health Action* 11(1): 1541220. <https://doi.org/10.1080/16549716.2018.1541220>.
- Peraturan Presiden. 2014. "Peraturan Presiden No 192 Tahun 2014." *Applied Microbiology and Biotechnology* 85(1): 2071–79.
- Pratiwi, Agnes Bhakti et al. 2021. "Is Indonesia Achieving Universal Health Coverage? Secondary Analysis of National Data on Insurance Coverage, Health Spending and Service Availability." *BMJ Open* 11(10).
- Presiden Republik Indonesia. 2022. "Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Rahayu, Niati. 2016. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS KESEHATAN DI KECAMATAN TANAH JAWA KABUPATEN SIMALUNGUN." 3(2): 1–15.
- Rahmiyati, Ayu Laili dkk. 2018. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepesertaan BPJS Mandiri Di Puskesmas Cipageran Tahun 2018." *Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Penelitian & Pengabdian Masyarakat (PINLITAMAS 1)* 1(1): 372–78. <https://repository2.stikesayani.ac.id/index.php/pinlitamas1/article/view/399/356>.
- Retnaningsih, Hartini. 2019. "Prinsip Portabilitas Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 9(2): 153–72.
- Rizky, Rafieqah Nalar and Mahardika, Ananda. 2023. "SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2(4): 1275--1289.
- Sekretaris Negara RI. 2004. "UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jdih BPK RI*: 1–45.
- Sonia, Putri, Aina Cici Ramadhani, Fitriani Pramita Gurning, and Syah Putra. 2022. "Analisa Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Di Puskesmas." *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(4): 260–67.
- Untari, Ida, and Anggita Hardian Putri. 2015. "Hubungan Antara Tingkat Sosial Ekonomi Keluarga Dengan Kepemilikan Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Corelation Between the Level of Social Economy Family With Ownership Bpjs (Social Security Agency)." *Profesi* 13(1): 30–37. <https://ejournal.stikespku.ac.id/index.php/mpp/article/view/102>.